

Analisis Pengendalian Internal Atas Transaksi Pengeluaran Kas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Febryandhie Ananda¹⁾, Mustika Winda²⁾, Riani Sukma Wijaya³⁾

^{1,2)} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

³⁾ Universitas Dharma Andalas

febryandhie@akbpstie.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out how to implement the internal control system for cash disbursements at the West Sumatra Provincial Health Office and to find out what obstacles arise in the implementation of the cash disbursement internal control system at the West Sumatra Provincial Health Office. This type of research is qualitative research, the data comes from several things, namely in the form of words and actions. The rest is additional data such as documents and others. To complete the research data, two data sources are needed, namely primary data sources and secondary data sources. The analytical method used in this research is descriptive analysis method, which is a method that aims to make a systematic, factual and accrual description of the facts, by comparing the theoretically studied cash disbursement procedure systems. The results of the observations presented by the author use closed questions through interviews with several trusted sources who work at the West Sumatra Health Office. The results of the study found that the cash disbursement procedure carried out by the West Sumatra Provincial Health Office was smooth and theoretical but not all procedures were the same because in a company there were different parties and different functions together. Procedures related to the cash disbursement system at the West Sumatra provincial health office have inconsistent procedures, namely the limited time in processing submitted documents, usually only 3 days, but some are neat in 5 days because the data checklist is not reviewed by PPKSKPD and Expenditures. The treasurer verifies the SPM document to be submitted to BPKAD.

Keyword: *internal control*

Detail Artikel:

Disubmit : 06 September 2022

Disetujui : 05 Desember 2022

DOI:10.31575/jp.v6i2.423

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang bernaung di bawahnya. Pemerintah juga dituntut untuk mengelola pemerintahan secara profesional dan efisien. Dinas Kesehatan yang merupakan instansi pemerintah memiliki fungsi dalam pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan penyakit dan bencana, Sumber Daya Kesehatan, Informasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Dengan fungsi tersebut maka alokasi anggaran terbesar adalah di bidang kesehatan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pemerintah sehingga berupaya

melakukan kinerja yang lebih baik. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.(Wowor et al., 2015)

Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan serta akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk memperoleh keuntungan semata. (Bawiling, 2015)

PP No. 60 2008 pasal 1 menyatakan bahwa “Sistem Pengendalian Internal adalah proses integral yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pada suatu entitas yang bertujuan menciptakan keyakinan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif”. Dengan adanya pengendalian internal atas pengeluaran kas maka dapat mengontrol anggaran untuk masing-masing kegiatan bidang kesehatan terealisasi dengan baik. Aspek pengeluaran kas menjadi pokok bahasan dimana prosedur pengendalian kas dapat meniadakan sistem pengendalian internal yaitu suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah. Sebuah organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengelola kegiatannya sekaligus mengatasi masalah-masalah yang muncul khususnya di bidang pengendalian aset pemerintah. Salah satu yang paling sulit diawasi adalah kas. (Pasaribu, 2020)

Kas merupakan aktiva yang dimiliki dan digunakan pada semua lembaga negara. Kas merupakan alat pembayaran yang diterima umum yang tersedia untuk pembayaran yang tidak dibatasi penggunaannya, baik yang berada di tangan (*cash on hand*) maupun yang berada di bank. Bila dalam instansi pemerintah terjadi penyimpangan, maka instansi harus mengelola uangnya sedemikian rupa, karena mudah dipindah tangankan. Oleh sebab itu instansi harus merancang serta menggunakan pengendalian internal atas transaksi kas. (Pasaribu, 2020).

Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang merupakan kebijakan, praktik, prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menjaga aktiva instansi pemerintah, memastikan akurasi dan keandalan informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional instansi pemerintah Sistem pengendalian internal pada setiap instansi pemerintah tentunya berbeda-beda tergantung kebijakan atasan pada instansi tersebut.(Pasaribu, 2020)

Bukti pengeluaran berupa kwitansi dari bendahara Pengeluaran kepada unit/pegawai penerima, menjadi pendukung setiap pengeluaran kas. Hal ini dapat dilihat dari lampiran penyertaan nota/kwitansi pengeluaran kas pada setiap penerbitan SP2D. DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) menjadi dasar dari sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada instansi pemerintah, di mana semua program pengeluaran dinas tertuang dengan jelas. Tujuan pengendalian ini adalah untuk mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan. Secara luas, fungsi pengendalian juga mencakup usaha pencegahan kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan. (Bawiling, 2015)

Keunikan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu (Pasaribu, 2020), masalah yang dibahas pada penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas, sedangkan penelitian penulis saat ini berfokus pada masalah sistem pengendalian internal yang digunakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat serta untuk mengetahui kendala yang muncul dalam penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis diatas dan didukung beberapa penelitian yang dilaksanakan para ahli. Oleh sebab itu, penulis tertarik memutuskan penelitian ini yang berjudul “Analisis Pengendalian Internal Atas Pengeluaran Kas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat”.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, peraturan-peraturan yang ada serta dokumen resmi lain. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan realita di lapangan, dan membandingkan dengan teori yang dipelajari dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan di lapangan (Prof. DR. Lexy J. Moleong, 2018).

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data bersumber dari beberapa hal yaitu. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Objek Penelitian

Sugiyono (2012:38) berpendapat bahwa konsep objek penelitian adalah atribut, sifat atau nilai seseorang, objek atau kegiatan, yang menunjukkan perubahan tertentu dan ditentukan oleh peneliti untuk penelitian dan kesimpulan selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan transaksi pengeluaran kas. Adapun objek penelitian yang menjadi variabel bebas atau independen adalah Analisis Pengendalian Internal Pengeluaran Kas.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari berbagai pihak seperti atasan pada bidang keuangan sebagai pembuat kebijakan, dan bendahara sebagai pengelola transaksi kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, serta staf keuangan lainnya yang terlibat dalam pengolahan dokumen transaksi.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian

kualitatif berguna untuk mengembangkan teori dari data yang sudah dikumpulkan selama penelitian di lapangan.

Adapun metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu :

1. Reduksi Data
Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka data dapat disajikan. Penyajian data merupakan suatu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian agar penelitian tersebut dapat dipahami dan dianalisis.
3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif, dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian akan dilakukan. Namun rumusan masalah tersebut dapat berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dengan membandingkan antara sistem-sistem prosedur pengeluaran kas yang dipelajari secara teoritis. Hasil observasi yang disajikan penulis menggunakan pertanyaan tertutup melalui wawancara dengan beberapa sumber terpercaya yang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Sumatera Barat yaitu :

Tabel 1
Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Arry Yuswandi, S.KM, M.KM	Kep. Dinas Kesehatan
2	Venny, SE	Sub Bag. Keuangan dan Pengelolaan Asset

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan di bawah Sistem Pengendalian Intern, dengan tujuan untuk melindungi aset perusahaan dari kecurangan pegawai.

a. Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memiliki tanggung jawab fungsional tersendiri. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemisahan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem

pengendalian internal atas pengeluaran kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- a. Fungsi penyimpanan kas terpisah dari fungsi akuntansi. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah memisahkan fungsi penyimpanan kas dari fungsi akuntansi. Dimana fungsi pengarsipan dilakukan oleh staf akun kasir dan pendaftaran dilakukan oleh fungsi akuntansi. Kasir bertanggung jawab untuk menerima atau menghitung uang dan membuat kuitansi. Sedangkan bagian akuntansi bertanggung jawab mengerjakan jurnal dan buku besar serta menyusun laporan keuangan berkala.
 - b. Transaksi pengeluaran kas tidak dapat dilakukan oleh kasir sendiri dari awal sampai akhir tanpa campur tangan fungsi lain. Penyaluran uang tunai yang berlangsung di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar tidak dilakukan oleh bagian perbendaharaan saja. Semua transaksi pencairan terjadi tidak hanya oleh kasir saja, tetapi dengan koordinasi departemen lain seperti keuangan, akuntansi, hutang dan staf treasury. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pengendalian internal yang baik untuk setiap transaksi pengeluaran kas.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- Setiap transaksi pengeluaran kas harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, yaitu cek pengeluaran harus ditandatangani oleh petugas keuangan dan direktur terkait. Sedangkan pencatatan pengeluaran kas yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar telah dilakukan konfirmasi terlebih dahulu oleh pejabat yang berkompeten dan tingkat ketelitian yang tinggi dalam menjaga aset perusahaan.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
 - a. Penggunaan formulir cetak bernomor urut yang penggunaannya harus dibuktikan oleh pihak yang berwenang di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menggunakan nomor dokumen yang tertera pada formulir tetapi menggunakan nomor urut transaksi. Untuk menghindari penipuan karyawan, formulir nomor transaksi digandakan dan jumlah uang tunai yang sebenarnya selalu dibuat antara uang tunai di dana dan catatan di akhir transaksi. Jika terjadi penipuan yang dilakukan oleh karyawan, akan terdeteksi langsung.
 - b. Secara berkala, jumlah uang tunai di tempat direkonsiliasi dengan catatan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk membandingkan jumlah uang tunai dengan catatan pembukuannya setiap hari setelah selesainya transaksi. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan antara spesies dan catatan yang ada.
 - c. Konter kasir dilengkapi dengan alat yang dapat mencegah kemungkinan uang dicuri dari kasir. Untuk menyimpan uang tunai di konter kasir, bagian kasir sudah lengkap. Bagian cash dilengkapi dengan brankas sebagai tempat menyimpan uang dan dokumen penting.
 4. Karyawan memiliki kualitas yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Memperoleh karyawan dengan keterampilan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melakukan pendidikan dan pelatihan tahunan serta penyaringan calon pegawai. Kriteria

yang digunakan untuk memilih karyawan antara lain: wawancara perilaku, tes potensi akademik (lulusan baru), tes kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan calon karyawan dalam kondisi fit.

Pengeluaran tunai dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk mendanai operasional dan pendanaan dinas. Sistem pengeluaran kas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan memberikan petunjuk bagaimana menagih pengeluaran atau pembayaran kepada pemangku kepentingan eksternal dan internal, serta mengidentifikasi pengeluaran kas dalam bisnis. Sistem pengeluaran kas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat cenderung merupakan pengendalian internal perusahaan, dimana semua pengeluaran kas harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menjadi tanggung jawab atas pembayaran yang dilakukan.

b. Prosedur dan Bagan Alur Flowchart Pengeluaran Kas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Prosedur yang terkait dengan prosedur pengeluaran kas sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran (PA) yakni Kepala Dinas Kesehatan menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK-SKPD.
- b. Berdasarkan SPD dan SPJ, bendahara membuat atau menginput SPP-GU beserta dokumen lainnya yang terdiri dari Surat Pengantar SPP-GU, Ringkasan SPP-GU, Rincian SPP-GU, Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya, Salinan SPD, Surat pernyataan pengguna anggaran, Lampiran lain.
- c. Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD untuk di Verifikasi sekaligus akan meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU berdasarkan SPD dan DPASKPD.
- d. SPP-GU yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPM oleh Bendahara Pengeluaran. Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-GU diterima.
- e. Rancangan SPM ini kemudian diberikan untuk di Verifikasi oleh PPK-SKPD dan selanjutnya akan diberikan kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi.
- f. Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disempurnakan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah diteliti oleh PPK-SKPD akan di arsip data komputer dan dicetak diserahkan kepada (BPKAD).
- g. BPKAD melakukan pengecekan atas kelengkapan data dan kebenaran Surat Perintah Membayar (SPM). BPKAD input SP2D di arsipkan ke komputer dan di cetak. BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana, SP2D yang telah diterbitkan tersebut kemudian diberikan kepada pihak Bank.
- h. Bank bertugas untuk melakukan pemindahan dari kas Negara ke rekening pegawai sebagaimana yang tercantum dalam SP2D yang diterima oleh BPKAD. Bank mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran. Ganti Uang masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran.

2. Kendala yang Muncul dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Dengan adanya prosedur yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, namun dalam menjalankan prosedur tersebut ada beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan yang dihadapi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Sistem yang error
 Pada sistem yang telah mengalami perubahan atau perubahan dari sistem yang lama digantikan dengan penggunaan sistem yang baru. Hal ini menimbulkan masalah bagi karyawan karena menghalangi mereka untuk memproses data atau merekam data terkait pengeluaran kas. Ini karena sistem masih belum siap untuk digunakan dan sistem sering crash.
2. Seringnya terjadi human error
 Selain menyesuaikan dengan sistem yang baru dan membiarkan kesalahan sistem terjadi, human error juga sering terjadi pada saat prosedur penagihan dan pembayaran serta pembayaran tunai di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Kesalahan manusia ini terjadi karena kesalahan pengeluaran kas pegawai pada saat pengolahan data atau pemasukan dan pencatatan data..

Hambatan ini, jika tidak diikuti, akan menghasilkan banyak data berkualitas rendah. Dan akan menimbulkan penyimpangan dari data yang dihasilkan sebagai dokumen pelaporan dan berguna sebagai informasi perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal.

Di antara banyak kendala yang dihadapi, perusahaan mencoba membuat sistem pengendalian internal yang berguna untuk mengevaluasi kinerja departemen treasury. Hal ini untuk meminimalisir kecurangan di bagian cash. Karena jika terus menerus menipu secara tunai, maka bisnis akan mengalami kerugian. Perusahaan telah berusaha untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang berguna untuk mengevaluasi kinerja departemen treasury. Hal ini untuk meminimalisir kecurangan di bagian cash. Karena jika tidak melakukan upaya awal, lembaga tersebut akan mengalami kerugian..

Adapun upaya terkait hambatan yang terjadi pada sistem yang error dan human error untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas adalah sebagai berikut :

1. Sistem error
 - a. Sistem yang terintegrasi
 Mengembangkan terciptanya sistem yang terintegrasi dan dapat mendukung seluruh proses penerimaan kas dan pengeluaran kas dan mempermudah para karyawan untuk melakukan pengolahan data.
 - b. Aksesibilitas
 Meningkatkan kenyamanan dalam pengolahan data dengan memberikan akses atau fasilitas yang memadai. Contoh dengan meningkatkan kecepatan Wifi.
2. *Humman Error*
 Setiap karyawan yang bekerja harus memiliki pendidikan, mendapat pelatihan dan memiliki pengalaman pada saat melakukan pekerjaan dapat

dilakukan dengan baik. Pelatihan harus diberikan agar para karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan keahliannya.

Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Prosedur pencairan kas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat lancar dan teoritis namun tidak semua prosedur sama karena dalam suatu perusahaan terdapat pihak yang berbeda dan fungsi yang berbeda secara bersama-sama.

Dari kelengkapan dokumentasi cukup lengkap dan sesuai dengan spesifikasi. Sistem pengendalian intern pencairan berupa struktur organisasi yang diwakili oleh pemisahan fungsi dalam setiap prosedur. Pemisahan tugas ini berguna untuk meminimalkan kesalahan yang akan menghambat proses pengumpulan dan pembayaran kas. Dan sistem otorisasi dan prosedur pendaftaran secara otoritatif dijelaskan dalam prosedur penerimaan dan pengeluaran dan catatan yang dibuat oleh bagian penagihan dan pengeluaran kas. Kewenangan ini akan memudahkan pelaksanaan tugas oleh pegawai. Pencatatan prosedur pengeluaran kas dilakukan pada komputer, yang memungkinkan proses dilakukan secara efisien dan efektif.

Selanjutnya, praktik yang wajar ini digambarkan dalam bentuk dokumen yang diperlukan untuk prosedur pengumpulan dan pengeluaran kas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa fungsi perbendaharaan dijalankan sesuai dengan fungsi dan keahliannya. Pelaksanaan pengendalian pembayaran kas internal di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dalam penyimpanan dokumen dan kelengkapan dokumen melalui checklist dokumen, data dan juga meminta review sebelum diserahkan ke BPKAD. Dokumen terkait sistem pengeluaran kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat seperti Laporan Keuangan (SPJ), Nota/Kwitansi, Surat Perintah Pembayaran (SPM) akan dikirimkan ke Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD), dalam dokumen terkait, sangat baik kelengkapan dokumen dapat lebih diperhatikan, terutama pada checklist data yang telah direview. ada pada saat pembuatan dokumen sampai dengan pengiriman dokumen.

Kewenangan mengenai sistem pengeluaran kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di bawah Departemen Keuangan sudah sangat baik sesuai dengan peraturan dan fungsi yang ada, mulai dari sistem yang dikelola sampai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Prosedur terkait sistem pengeluaran kas di dinas kesehatan provinsi Sumatera Barat memiliki prosedur yang tidak konsisten yaitu keterbatasan waktu dalam memproses dokumen yang diserahkan biasanya hanya 3 hari tetapi ada yang rapi dalam 5 hari karena checklist data tidak ditinjau oleh PPKSKPD dan Pengeluaran. Bendahara melakukan verifikasi terhadap dokumen SPM untuk diajukan ke BPKAD.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian dari (Rativa, 2019) yang menemukan bahwa struktur organisasi yang baik dapat memisahkan tugas yang jelas dalam setiap bagian, dimana fungsi penyimpanan dilakukan oleh bagian keuangan dan pencatatan dilaksanakan oleh bagian akuntansi. Kemudian penelitian

dari Laotongan (2019) juga menemukan bahwa prosedur sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS) akan efektif jika struktur organisasi instansi juga berjalan dengan efektif.

2. Kendala dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan analisis dan perancangan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pengeluaran Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diambil simpulan bahwa sistem terkomputerisasi bisa saja terjadi sistem error. Hal ini menimbulkan masalah bagi karyawan karena menghalangi mereka untuk memproses data atau merekam data terkait pengeluaran kas. Ini karena sistem masih belum siap untuk digunakan dan sistem sering crash. Selain itu, human error juga sering terjadi pada saat prosedur penagihan dan pembayaran serta pembayaran tunai di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Kesalahan manusia ini terjadi karena kesalahan pengeluaran kas pegawai pada saat pengolahan data atau pemasukan dan pencatatan data.

Untuk meminimalisir kecurangan di bagian cash, instansi membuat sistem pengendalian internal yang berguna untuk mengevaluasi kinerja departemen treasury. Karena jika tidak melakukan upaya awal, instansi tersebut akan mengalami kerugian. Adapun upaya terkait hambatan yang terjadi pada sistem yang error dan human error untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas adalah mengembangkan terciptanya sistem yang terintegrasi dan dapat mendukung seluruh proses penerimaan kas dan pengeluaran kas dan mempermudah para karyawan untuk melakukan pengolahan data. Kemudian meningkatkan kenyamanan dalam pengolahan data dengan memberikan akses atau fasilitas yang memadai. Setiap karyawan yang bekerja harus memiliki pendidikan, mendapat pelatihan dan memiliki pengalaman pada saat melakukan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Pelatihan harus diberikan agar para karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan keahliannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Iswandir (2018) menemukan bahwa pengembangan sistem yang terintegrasi akan memudahkan instansi dalam menjalankan operasional biak dalam hal pemasukan maupun pengeluaran kas. Selain itu (Rondonuwu et al., 2020) juga menemukan bahwa sumberdaya manusia yang kompeten akan mendukung instansi dalam menjalankan sistem yang terintegrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengendalian intern pengeluaran kas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar berjalan sesuai proses yang ada dimana ada pemisahan tugas yang jelas, fungsi berjalan cukup baik dan tidak ada gangguan perubahan secara bersamaan. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas kantor didukung dengan dokumen-dokumen yang relevan, hanya saja terdapat beberapa kendala dalam sistem pengeluaran kas yaitu penyampaian dokumen menyebabkan kendala waktu,

waktu dan kurang memperhatikan checklist data yang ada sampai dengan terjadi kesalahan pada dokumen.

2. Kendala yang sering terjadi seperti sistem error dan human error dapat diatasi dengan membuat sistem pengendalian internal yang terintegrasi yang dapat mendukung seluruh proses penerimaan kas dan pengeluaran kas dan mempermudah para karyawan untuk melakukan pengolahan data. Kemudian karyawan yang bekerja harus memiliki pendidikan, mendapat pelatihan dan memiliki pengalaman pada saat melakukan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Pelatihan harus diberikan agar para karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan keahliannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Ilmu Ekonomi KBP dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang telah berkontribusi besar untuk terbitnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawiling, C. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Kantor Pengadilan Agama Tondano. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).
- Laotongan, R. R. I. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Dinas Kesehatan Kota Manado.
- Lathifah, N. (2021). Konsep Dan Praktik Sistem Pengendalian Internal. Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D). (2008). Alfabeta.
- Pasaribu, R. M. (2020). Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Samosir.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.
- Radiva, E. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pengeluaran Kas Pada Pt. Bumi Karsa Makassar.
- Rama, J. (N.D.). Sistem Informasi Akuntansi 1. Penerbit Salemba.
- Riandari, E., & Sudarno, S. (2013). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Di Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Rondonuwu, C. B., Ilat, V., & Runtu, T. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 316. <https://doi.org/10.32400/Gc.15.3.28779.2020>
- Wowor, S. E., Karamoy, H., & Sabijono, H. (2015). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (Dppkad) Kota Tomohon. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).